

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan krusial yang hingga kini masih dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia adalah Kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah terus menggencarkan berbagai program pembangunan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Namun, realitas menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, jutaan penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dapat dilihat pada dampak kemiskinan yang semakin meluas, permasalahan multidimensional yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya persoalan rendahnya pendapatan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan adalah inti dari permasalahan pembangunan dan tujuan utama dari kebijakan pembangunan di banyak negara.

Kemiskinan adalah salah satu isu utama yang dihadapi oleh masyarakat global dan menjadi salah satu fokus dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs adalah sebuah kerangka kerja

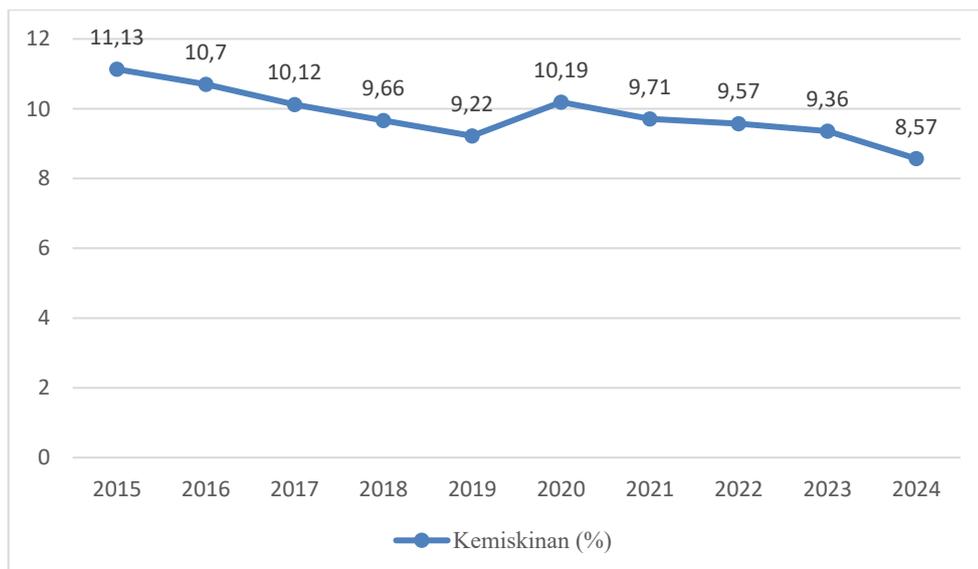
global yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di seluruh dunia. Bahkan Tujuan pertama dari SDGs adalah "Menghapuskan Kemiskinan", yang memperkuat komitmen global untuk mengurangi kemiskinan yang ekstrem dan mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi (BPS, 2024).

Kemiskinan dapat diartikan keadaan saat ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan, tempat tinggal dan kesehatan. Negara Indonesia sebagai negara berkembang tentunya menghadapi permasalahan ini. Kemiskinan menjadi salah satu agenda yang patut diperhatikan karena secara tersirat kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat yang merata secara material dan spiritual. Dari kemiskinan, bisa muncul masalah-masalah sosial lain seperti meningkatnya pemukiman kumuh, pekerja seks komersial, anak jalanan yang kebanyakan adalah anak putus sekolah, tingkat kejahatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi salah satu target pembangunan yang perlu dievaluasi secara berkala (Tri Darmawanto, 2023).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat, baik secara nasional maupun regional. Setiap tahun perkembangan penduduk miskin dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan menjadi pokok bahasan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS Indonesia, 2020).

Di berbagai daerah di Indonesia, kemiskinan masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakatnya. Fakta menunjukkan pembangunan ekonomi belum mampu meredam kemiskinan diberbagai daerah khususnya di daerah yang tingkat kemiskinannya relatif naik dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sektor-sektor potensial di daerah menjadi salah satu cara untuk pengentasan kemiskinan juga dengan cara lain tergantung dengan strategi dan kebijakan masing-masing daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Gambar 1. 1
Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2024

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2015-2024 ditunjukkan pada gambar 1.1 secara umum, pada tahun 2015-2024 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan, kecuali pada tahun 2015 dan 2020. Terjadinya kenaikan kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 11,13% disebabkan oleh adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat

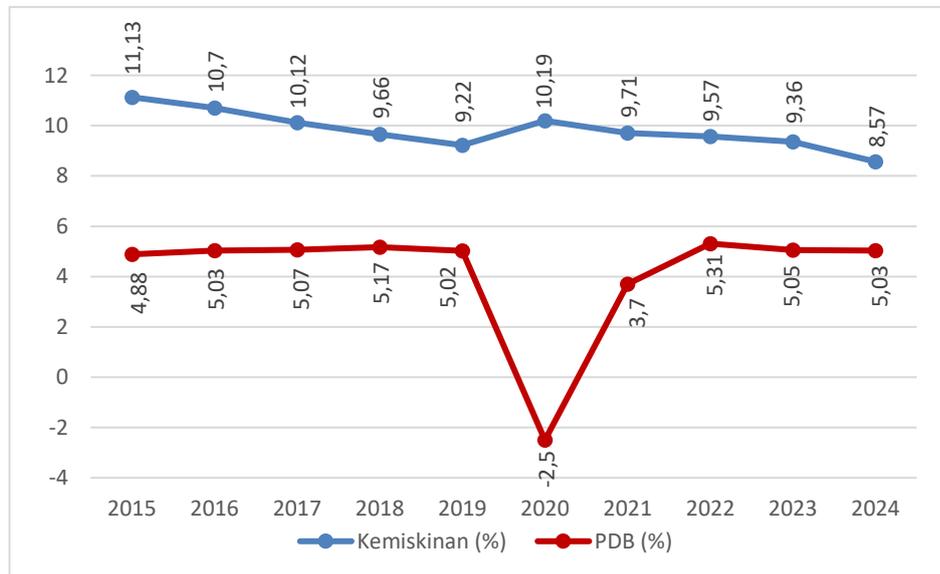
naiknya harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 10,19%. Hal ini terjadi akibat terhambatnya mobilitas penduduk selama pandemi Covid-19 di Indonesia yang dimana mempengaruhi perekonomian dan meningkatnya angka kemiskinan. Dan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 8,57%.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai hasil pertumbuhan ekonomi ke seluruh sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Maka dari itu, untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan.

Penggunaan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai parameter yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah atau adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh Karena itu, setiap daerah akan selalu berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa daerahnya kepada kehidupan yang lebih baik. Setiap pemerintahan akan mengukur keberhasilan perekonomian daerahnya dengan berbagai indikator yang paling representatif. Tentunya hal ini untuk mengetahui kemampuan kerja elemen pemerintahan dan semua pihak yang berkepentingan (Habibah Shobri *et al.*, 2022).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, seperti daya beli masyarakat, pengeluaran pemerintah, inflasi dan sebagainya (Munandar, 2017).



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Gambar 1. 2
Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Harga Konstan terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2024

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan. Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren yang relatif stabil pada periode 2015 hingga 2019, yaitu berada di kisaran 4,88% hingga 5,17%. Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan, dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 9,22% pada tahun 2019. Penurunan kemiskinan ini mencerminkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi nasional memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam pertumbuhan ekonomi hingga hanya -2,5%, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dampak dari perlambatan ekonomi tersebut sangat signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat, yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 10,19%. Hal ini mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinann, khususnya pada kondisi krisis.

Selanjutnya, dalam periode 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren pemulihan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai angka tertinggi dalam periode tersebut, yaitu sebesar 5,31%. Sejalan dengan pemulihan tersebut, tingkat kemiskinan secara bertahap menurun, dari 10,19% (2020) menjadi 8,57% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi turut mendorong perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan.

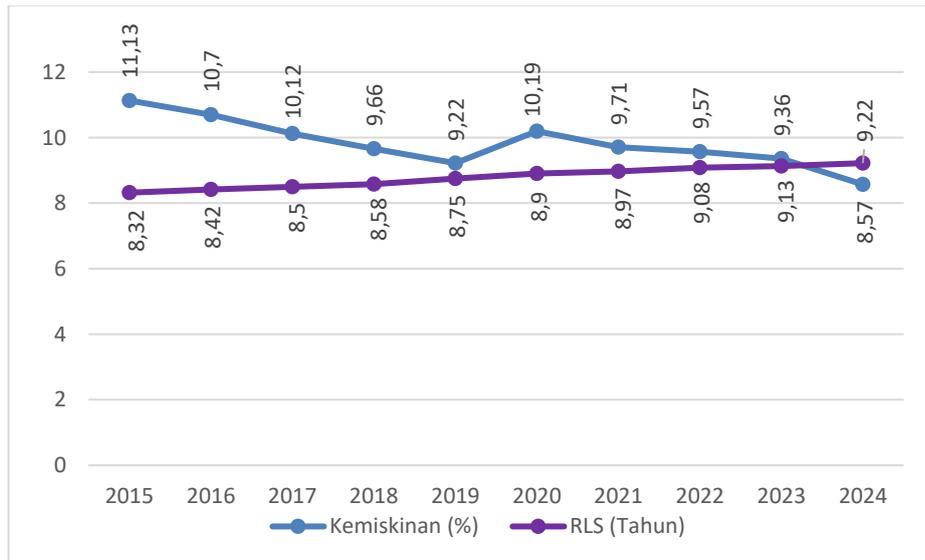
Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi status kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin. Indikator pendidikan dianggap sebagai investasi dalam sumber daya manusia karena bagi individu yang berpendidikan memiliki manfaat yang sangat besar selama aktivitas seumur hidup. Meskipun investor saat ini tidak dapat menikmati manfaat langsung dari pendidikan. Pendidikan dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pengembangan sumber daya manusia diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja ekonomi, salah satu cara untuk mengamati hal tersebut melalui sudut pandang program wajib belajar 12 tahun (Arina, 2024).

Pendidikan yang berkualitas sering kali membuka pintu menuju peluang pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi. Individu yang memiliki

pendidikan formal yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang stabil dan upah yang lebih baik, yang membantu mereka menghindari jatuh ke dalam kemiskinan. Selain itu, pendidikan berkontribusi pada inovasi dan pembangunan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Dengan memiliki populasi yang terdidik, negara memiliki sumber daya intelektual yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah rata-rata tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pendidikan formal mencakup jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Dalam mengukur RLS, tidak memperhitungkan tahun yang dihabiskan untuk penduduk yang mengulang karena tidak naik kelas. Secara umum, nilai indikator ini menunjukkan tingkat keterampilan dan kompetensi penduduk suatu wilayah, yang dapat dilihat sebagai proksi dari aspek kuantitatif dan kualitatif dari stok sumber daya manusia. Nilai yang relatif tinggi menunjukkan capaian pendidikan yang ditamatkan oleh rata-rata penduduk dewasa di suatu wilayah semakin tinggi. Capaian RLS yang semakin tinggi juga mencerminkan sistem pendidikan yang berkinerja baik (Andriani, SE., MT, 2019).



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Gambar 1.3
Persentase Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan
di Indonesia Tahun 2015-2024

Pada gambar 1.3 dilihat bahwa rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama, dalam tahun, penduduk usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan formal. Nilai rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan secara umum dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Tingkat kemiskinan mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2015-2024, angka kemiskinan menunjukkan tren menurun. Rata-rata lama sekolah mencerminkan capaian pendidikan selama 15 tahun keatas. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 8,32 tahun menjadi 9,22 tahun 2024, yang menunjukkan peningkatan hampir 1 tahun dalam dekade terakhir. Ini berarti makin banyak masyarakat Indonesia menempuh pendidikan hingga hampir jenjang SMP/ sederajat, yang sebelumnya mungkin terputus pada jenjang SD. Peningkatan paling signifikan terjadi setelah 2019, yang menunjukkan adanya percepatan pemerataan akses pendidikan. Meski pandemi

melanda pada 2020, rata-rata lama sekolah tetap meningkat, mengindikasikan ketahanan sistem pendidikan.

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun dari 11,13% tahun 2015 ke 8,57% tahun 2024. Ini berarti lebih dari 2,5 juta penduduk telah keluar dari kemiskinan selama periode tersebut. Namun, kenaikan signifikan terjadi pada 2020 naik menjadi 10,19% sebagai dampak langsung dari COVID-19. Ini adalah satu-satunya titik balik dalam tren menurun. Setelah tahun 2020, tren kemiskinan kembali menurun dengan konsistensi yang stabil.

Ini menunjukkan bahwa peningkatan 0,9 tahun rata-rata lama sekolah beriringan dengan penurunan kemiskinan sebesar 2,56%. Dengan kata lain, setiap peningkatan 0,1 tahun pendidikan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan secara bertahap.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Ramdass, 2010).

Selain itu, faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran sering dialami oleh suatu negara dan dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan masalah ekonomi. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Dan masalah

pengangguran bertambah serius yang disebabkan perkembangan penduduk yang bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar.

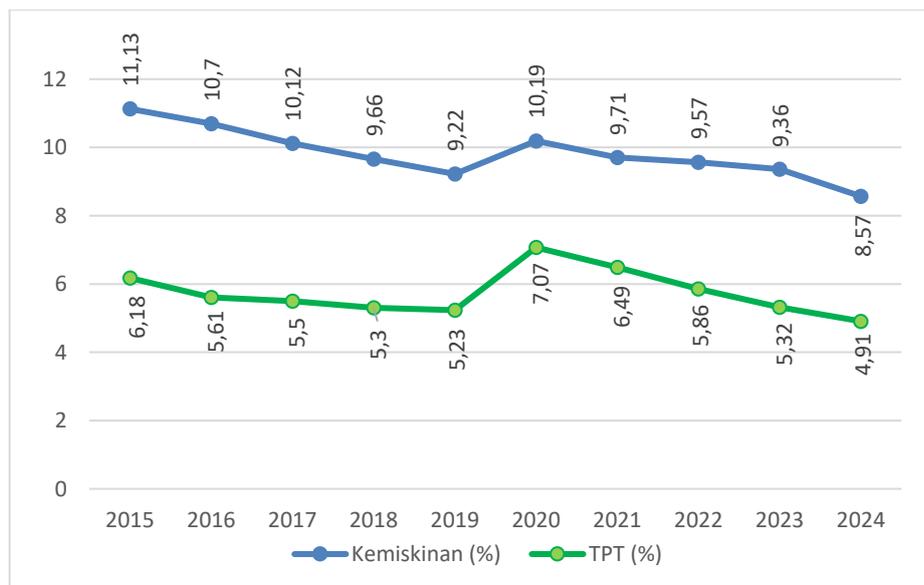
Pengangguran merupakan masalah yang kompleks dan krusial di Indonesia. Dengan tingkat pengangguran tinggi yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, memperburuk kondisi sosial-ekonomi, dan mengancam stabilitas politik serta kemajuan negara. Ada beberapa jenis pengangguran, salah satunya pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tidak memiliki pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, serta sedang mempersiapkan usaha, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Ramadhan *et al.*, 2025).

Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Pengangguran disebabkan oleh ketidak seimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya penghasilan yang berefek terhadap pengurangan kesejahteraan yang sudah dicapai individu. Semakin berkurangnya kesejahteraan yang disebabkan karena menganggur akan menyebabkan peningkatan peluang untuk terjebak dalam kemiskinan (Ardian *et al.*, 2021).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) disuatu wilayah yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, terhadap jumlah seluruh penduduk angkatan kerja. Indikator ini dihasilkan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan menggambarkan kemampuan aktivitas ekonomi disuatu wilayah untuk menyerap tenaga kerja. Semakin rendah TPT maka semakin besar peluang penduduk angkatan kerja untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh

penghasilan wilayah tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkecil peluang untuk jatuh miskin (Indonesia, 2024).

Menurut Andini (2024) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi faktor yang potensial menyebabkan kemiskinan. Puncak pendapatan dapat dicapai ketika kondisi ketenagakerjaan mencapai penuh (*full employment*). Peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memadai dapat memperparah masalah pengangguran di suatu daerah. Tingginya tingkat pengangguran dapat mencerminkan ketidakberhasilan pembangunan suatu negara.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Gambar 1. 4
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2024

Data yang disajikan pada gambar 1.4 menggambarkan tren 10 tahun rasio kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Secara umum, kedua indikator

menunjukkan kecenderungan menurun, karena pada tahun 2020 merupakan tahun yang menyimpang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Kemiskinan pada tahun 2015 turun dari 11,13% menjadi 9,22% tahun 2019, sementara TPT tahun 2015 turun dari 6,18% menjadi 5,23% tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 guncangan pandemi mendorong TPT melonjak ke 7,07% dan kemiskinan naik ke 10,19%. Kebijakan pembatasan mobilitas menyebabkan PHK dan pemutusan hubungan kerja massal. Tahun 2024 pemulihan ekonomi menurunkan TPT menjadi 4,91%. Kemiskinan turun lebih lambat ke 8,57%. Penurunan TPT lebih cepat karena sektor yang menyerap banyak pekerja seperti manufaktur dan perdagangan cepat pulih setelah pandemi, sehingga banyak penganggur bisa segera bekerja kembali, namun perbaikan kemiskinan tertahan oleh inflasi pangan 2022 dan perlambatan global 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi mencerminkan banyaknya penduduk yang tidak bekerja sama sekali dan tidak memiliki penghasilan. Hal ini menyebabkan jurang pemisah antara seseorang yang berpenghasilan dan seseorang yang tidak berpenghasilan semakin dalam. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan pendapatan. Oleh sebab itu, Tingkat Pengangguran Terbuka harus diatasi sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang (Nurdini *et al.*, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia?

2. Bagaimanakah pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penulis akan meningkatkan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan angka Kemiskinan melalui peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, peningkatan kualitas Pendidikan, serta pengurangan tingkat Pengangguran.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti.